

DINAMIKA NU DAN MODERNISME KEAGAMAAN

Oleh: Hamidah

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan kegiatan perdagangan yang berkembang sejak abad ke XI. Adanya kontak dagang tersebut menyebabkan tumbuhnya pemukiman masyarakat muslim di wilayah pesisir kepulauan Nusantara, sehingga lambat laun Islam telah menjadi bagian yang menguasai batin masyarakat Indonesia.

Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari kultur masyarakat setempat. Pergumulan Islam dengan kultur yang telah mendarah daging menuntut adanya adaptasi yang kontinu tanpa harus kehilangan ide aslinya. Islam, ketika berhadapan dengan realitas sejarah, akan memunculkan realitas baru yang tidak hanya diakibatkan pergumulan internalnya dalam merespon masalah yang muncul tetapi juga keterlibatannya dalam proses sejarah yang bertindak sebagai subyek yang ikut membentuk keadaan zaman.

Salah satu wujud dari fenomena tersebut adalah organisasi NU yang berdiri di Surabaya pada tahun 1926. Organisasi ini dipelopori para kyai yang berpusat di Pesantren-pesantren yang berdasar pada tradisi keilmuan tertentu. M. Ali Haidar

menyebutkan bahwa: “ Organisasi NU berkesinambungan menelusuri mata rantai historis sejak abad pertengahan yaitu apa yang disebut *Ahlu al-sunnah wal Jama'ah* “. ¹

NU merupakan suatu organisasi ulama tradisional yang mempunyai jumlah pengikut yang banyak. Martin menyebutkan: “ NU memiliki paling tidak dua puluh juta muslim meskipun tidak terdaftar secara resmi tetapi merasa terikat pada NU melalui ikatan kesetiaan primordial (tradisi pesantren dan kharismatik kyai)”. ² Disamping itu, NU juga merupakan organisasi non-pemerintah yang tergolong besar yang masih mengakar di kalangan bawah. Azyumardi Azra menyebutnya sebagai fenomena rural. ³ Disebut demikian karena mayoritas pengikut NU berasal dari masyarakat desa (rural area) yang pola hidupnya masih sederhana dan cenderung tradisional.

Sebagai organisasi sosial keagamaan tradisional dan merupakan fenomena rural, NU memiliki vitalitas yang tinggi. Suatu kekuatan sosial, kultural dan keagamaan yang mempunyai vitalitas tidak mungkin beku tanpa mengalami perubahan. Seperti yang diungkapkan oleh Snouck Hurgronje:

Islam Tradisional (NU) yang kelihatannya demikian statis dan demikian kuat terbelenggu oleh fikiran-fikiran ulama di abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang fundamental: tetapi perubahan-perubahan tersebut demikian bertahap-tahap, demikian rumit. Itulah sebabnya bagi para pengamat yang tidak kenal dengan pola fikiran Islam, maka perubahan-perubahan tersebut tidak akan bisa terlihat,

¹ M. Ali Haidar, *NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 2

² Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 3

³ Catatan kuliah semester III pada mata kuliah Pemikiran Moderen di Dunia Islam, Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol, Padang, 1995

walaupun terjadi di depan matanya sendiri, kecuali bagi mereka yang mengamatinya secara seksama.⁴

Perubahan-perubahan evolutif muncul karena adanya sifat NU yang dinamis, akomodatif dan responsif terhadap persoalan-persoalan kesemestaan. Hal demikian tergambar pada sikap NU terhadap azas tunggal Pancasila, NU telah mampu melakukan sebuah proses penyesuaian dengan tuntutan sebuah negara moderen. Begitu pula dalam bidang ekonomi NU telah mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR NU) bekerjasama dengan Bank Summa. BPR telah menyediakan kredit kecil bagi para wiraswastawan kecil dan petani yang berlatar belakang NU. Dalam bidang kesehatan NU juga mengakomodir persoalan-persoalan aktual seperti tentang transplantasi organ tubuh, operasi penggantian kelamin, euthanasia dan sebagainya.

B. NU dan Sejarah Perkembangannya

1. Latar Belakang Lahirnya NU

NU merupakan Jami'iyah, organisasi, yang tidak bisa dipisahkan dengan tradisi pesantren dan tokoh kyai sebagai pusatnya. Organisasi ini secara resmi berdiri di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926.

Keberadaan NU merupakan reaksi atas perkembangan modernisme Islam, yang tarik menarik antara perkembangan politik di Timur Tengah dengan dinamika gerakan Islam di Tanah Air. Reaksi dimaksud merupakan sikap protes dari tokoh-tokoh Islam yang menyatakan diri sebagai penganut *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, dimana akar-akar reaksi itu berdemensi ideologis- kultural.

⁴ Snouck Hurgronje, dikutip dari Clifford Geertz, *Modernization in a Moslem Society: The Indonesian Case*, dalam *Quest*, vol. 39, Bombay, 1963, h. 16

Menapaktifikasi latar belakang lahirnya NU paling tidak ada dua argumentasi klasik, yang bisa dijadikan landasan mengapa organisasi ini muncul, *Pertama*: pembentukannya dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap aktifitas kelompok reformis (dalam hal ini adalah Muhammadiyah) dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik (Sarikat Islam). *Kedua* adalah, bermula dari komite Hejaz. Di mana sejak awal 1924 konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin mempengaruhi gerakan Islam di tanah air Indonesia.

Argumen yang pertama melihat bahwa NU didirikan oleh kalangan kyai tradisional yang menyaksikan posisi mereka terancam dengan munculnya Islam Reformis. Berkaitan dengan ini Martin Van Bruinessen berpendapat bahwa: “Pengaruh Muhammadiyah dan SI semakin meluas telah memarjinalisasikan kyai, yang sebelumnya merupakan satu-satunya pemimpin dan juru bicara komunitas muslim. Ajaran kaum pembaharu sangat melemahkan legitimasi mereka. NU didirikan untuk mewakili kepentingan-kepentingan kyai *vis a vis* pemerintah dan kaum pembaharu”.⁵

Argumen ini juga didukung Alfian, menurutnya: “Salah satu fakta empiris lahirnya NU karena terjadinya perkembangan politik di kalangan umat Islam di Indonesia pada awal abad ini. Khususnya perkembangan politik di kalangan umat Islam yang sangat sedikit sekali memberi tempat pada golongan tradisional”.⁶

Alfian tampaknya lebih melihat posisi keterasingan atau keterpinggiran kalangan ulama pesantren (ulama tradisional) dalam percaturan politik di SI. Lebih jauh lagi Alfian memberikan argumennya bahwa:

⁵ Martin Van Bruinessen, *op. cit.*, h. 26

⁶ Alfian, *Sekitar lahirnya NU*, Resume Tesis tahun 1969 h. 2: Dokumentasi Lakpesdam, tidak dipublikasikan.

“Sejak semua golongan Islam (golongan pembaharu dan tradisional) yang memegang peranan dalam SI adalah mereka yang berada di kota-kota yang terdiri dari (1) intelektual Islam berpendidikan Barat (seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Haji Agus Salim dan Abdul Muis dan (2) para santri yang menganut dan terpengaruh oleh ajaran-ajaran modernisme Islam, terutama anggota Muhammadiyah. Sedangkan para ulama dan kyai yang beraliran *ahlusunnah waljamaah*, atau pengikut mazhab yang disebut sebagai golongan santri tradisional yang kebanyakan terdapat di pedesaan (*rural area*), walaupun ada yang menjadi anggota atau pengurus SI, mereka tidak mempunyai peranan penting atau menonjol di dalamnya”.⁷

Penjelasan ini hendak memberi pemahaman bahwa sebetulnya terdapat upaya perebutan kepentingan organisasi SI oleh kalangan tokoh Islam saat itu. SI, semula SDI, didirikan tahun 1911 merupakan salah satu wadah politik yang berbasis Islam tetapi berideologi kebangsaan. Meminjam istilah Ruslan Abdul Gani, SI adalah nasionalisme politik religius (*religious political nationalism*). Dalam hal ini corak nasionalisme SI yaitu nasionalisme yang berlandaskan Islam.

Kepentingan politik dalam SI sangat bervariasi, dan umumnya didominasi oleh kalangan Islam yang berdomisili di perkotaan. Dengan demikian dapat juga dijelaskan karena faktor tempat, kalangan Islam modernis memperoleh akses lebih besar untuk berkiprah dan berperan di dalam percaturan politik SI, semetara pada saat yang bersamaan terjadi proses “penolakan” terhadap para ulama pesantren yang berbasis di pedesaan. Nampaknya di sinilah ketegangan dan konflik semakin terbuka pada saat pertemuan tokoh-tokoh Islam dari berbagai aliran seperti pada beberapa kali kongres Islam se Indonesia.

⁷ Alfian, *Ibid.*

Adanya ketegangan dan konflik berangkat dari sikap kalangan reformis yang berusaha merelatifkan ajaran yang dianut oleh kalangan tradisional, dan yang lebih mengecewakan para kyai-ulama pesantren, adalah sikap para reformis yang terus berusaha memperkecil validitas dan prinsip-prinsip *taqlid*. Pada hal *taqlid*, menurut ajaran tradisional dirasakan perlu, tetapi bukan dalam artian iman, melainkan lebih berkaitan dengan keberadaan penafsiran ajaran Islam (bersumber dari Al-Quran dan Hadis) yang absah, dan kalangan ulama/kyai mempunyai dasar untuk itu. Mengutip pendapat mahfudz Siddiq, Deliar Noer menulis “mereka yang sanggup melaksanakan ijtihad, yaitu yang memenuhi syarat-syarat untuk itu, “wajib untuk melaksanakannya, kalau tidak maka wajiblah ia taqlid”.⁸

Sikap para reformis yang tidak konformistis, ditambah dengan usaha-usah atau program-program organisasi Islam reformis yang terus meluaskan pengaruhnya, melalui khususnya pengembangan pendidikan, menjadikan para kyai di pesantren merasa ditantang. Berkaitan dengan hal ini Laode Ida melihat konflik NU vs Islam Modernis: (1) karena sekolah-sekolah kalangan reformis bersaing dengan pesantren, (2) pengecilan makna *taqlid* yang merupakan legitimasi milik kyai sebagai penafsir dari Mazhab Syafi’I, dan (3) karena kebiasaan tradisional dari kyai-kyai dianggap sebagai inovasi yang tidak syah (*illegal innovation*) oleh para pemimpin Muhammadiyah.⁹

Paparan yang dikemukakan di atas merupakan salah satu fakta empiris sehingga NU lahir. Fakta ini banyak di akui oleh para penulis sejarah NU khususnya dari kalangan komunitas NU sendiri juga penulis yang non-Islam sebagai latar belakang lahirnya NU. Meskipun demikian, sebagian ahli melihat adanya faktor yang lain yang

⁸ Deliar Noer, *Gerakan moderen Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 254

melatar belakangi keberadaan NU dengan argumen bahwa kelahiran NU tidak dapat dipisahkan dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Menurut M. Ali Haidar Isu yang berkembang bahwa di Turki kekhilafahan Abdul Majid mengalami konflik dengan gerakan Mustafa Kemal, menyusul kemudian berita bahwa para ulama Mesir akan menyelenggarakan pertemuan internasional, untuk membahas soal khalifah.¹⁰

Senada dengan hal tersebut, Slamet Effendi Yusuf menjelaskan bahwa: “Sejak perang dunia I umat Islam Indonesia sudah mulai tertarik pada masalah *khilafat*. Daulat Utsmaniyah guncang, sedang kekuasaan Sultan Turki yang dipandang sebagai khalifah termasuk oleh umat Islam di Indonesia sedang terancam oleh kaum nasionalis Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal, atau Kemal Attaturk. Tahun 1924. tiga tahun sesudah munculnya golongan nasionalis itu, kesultanan Turki bahkan sudah ambruk, diganti dengan suatu pemerintahan lain yang berbentuk Republik”.¹¹

Perkembangan ini menimbulkan pemikiran tersendiri bagi dunia Islam mengenai perlunya membentuk suatu kekhilafatan baru. Kebetulan, penguasa di Mesir punya rencana untuk mengadakan kongres tentang khilafat pada bulan Maret tahun 1924. Rencana ini disambut positif oleh berbagai pihak. Di Indonesia, untuk menyambut gagasan itu, dibentuk Komite Khilafat di Surabaya tanggal 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirjo (kemudian dikenal dengan Wondoamiseno) dari Sarekat Islam dan wakil ketua K.H.A. Wahab Hasbullah.

⁹ Laode Ida, *Anatomi Konflik: NU, Elit Islam dan negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 17

¹⁰ M. Ali Haidar, *op. cit.*, h. 55

¹¹ Slamet Effendi Yusuf (*et. al*), *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, (Jakarta: CV. Raja Wali, 1983), h. 17

Selanjutnya, menurut Deliar, diadakan lagi Kongres al-Islam ketiga di Surabaya bulan Desember 1924 antara lain memutuskan untuk mengirim sebuah delegasi ke kongres Kairo, terdiri dari Surjopranoto (Sarekat Islam), Haji Fachroddin (Muhammadiyah) serta K.H.A. Wahab dari kalangan tradisi.¹²

Tapi Kongres di Kairo ditunda, sedangkan minat orang-orang Islam di Jawa tertarik pada perkembangan di Hijaz di mana Ibnu Sa'ud berhasil mengusir Syarif Husein dari Mekkah tahun 1924. Segera setelah kemenangan ini pemimpin Wahabi (Ibnu Sa'ud) mulai melakukan pembersihan dalam kebiasaan praktek beragama sesuai dengan ajarannya, walaupun ia tidak melarang pelajaran mazhab di Masjid Haram. Tindakannya ini sebagian mendapat sambutan baik di Indonesia, tetapi sebagian juga di tolak. Ulama di Sumatera, misalnya, terus memberikan perhatian terhadap persiapan Mesir untuk mengadakan konferensi tersebut. Pada tahun 1926 Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul berangkat ke Kairo untuk menghadiri konferensi itu.

Selanjutnya Deliar menyebutkan: "Suatu undangan dari Ibnu Sa'ud kepada kaum Islam Indonesia untuk menghadiri kongres Islam di Mekkah dibicarakan di kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta (21-27 Agustus 1925) dan kongres Islam kelima di Bandung (6 Februari 1926). Kedua kongres ini kelihatannya didominasi oleh golongan pembaharu Islam. Malah sebelum kongres di Bandung suatu rapat antara organisasi-organisasi pembaharu di Cianjur, Jawa Barat (8-10 Januari 1926) telah memutuskan untuk mengirim Tjokroaminoto dari Sarekat Islam dan Kyai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah ke Mekkah untuk mengikuti kongres. Pada kongres di Bandung (kongres Islam kelima) K.H.A. Abdul Wahab atas nama kalangan tradisi mengajukan usul atas nama kalangan tradisi memajukan usul-usul agar kebiasaan-kebiasaan agama

¹² Deliar Noer, *op. cit.*, h. 242

seperti membangun kuburan, membaca do'a seperti *dalail al-akhirat*, ajaran mazhab, dihormati oleh kepala negeri Arab yang baru dalam negaranya, termasuk di Mekkah dan Madianh. Kongres di Bandung itu tidak menyambut baik usul-usul ini, sehingga K.H.A.Wahab dan tiga orang penyokongnya keluar dari komite khilafat tersebut".¹³

Wahab selanjutnya mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat-rapat kalangan ulama Kaum Tua, mulanya ulama dari Surabaya, kemudian juga dari Semarang, Pasuruan, Lasem dan Pati. Mereka bersepakat untuk mendirikan panitia yang disebut *Komite Merembuk Hijaz*. Komite inilah yang pada akhirnya diubah menjadi Nahdlatul Ulama . Menurut Slamet Effendi, "Langkah ini mendapat sambutan yang antusias dari kalangan ulama ulama terkemuka di Jawa. Maka pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan 16 Rajab 1334 H. para ulama berkumpul di rumah K.H.Abdul Wahab Hasbullah di kampung Kertopaten, Surabaya. Selain itu hadir K.H.Muhammad Hasjim Asj'ari, Tebuireng Jombang; K.H. Bisjri Sansuri, Tambak Beras Jombang; Raden Asnawi, Kudus; Ma'shum, Lasem; Ridlwan, Semarang; Nawawi, Pasuruhan; Nahrawi, Malang; Ridlwan, Surabaya; Abdullah Ubaid, Surabaya; Alwi Abdul Aziz. Malang; H. Abdul Halim, Leuwimunding Cirebon; H. Ngoro Munthaha (menantu K.H. Khalil Bangkalan) Madura, Dahlan Abdulqahar. Kertosono dan H. Abdullah Fiqih Gersik.¹⁴

Menurut Saifuddin Zuhri, dalam pertemuan tersebut telah diambil dua keputusan paling penting sebagai berikut: *Pertama*, meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang di utus menemui Raja Saud kembali ke tanah air. *Kedua*, membentuk Jam'iyah (organisasi) untuk wadah persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat menuju terciptanya cita-cita *izzul*

¹³ *Ibid.*, h. 343

¹⁴ Slamet Effendi Yusuf, *op. cit.*, h. 19

islam wal muslimin. Atas usul dari Alwi Abdul Aziz, Jam'iyah ini diberi nama "*Nahdlatul Ulama*" yang artinya "Kebangkitan Para Ulama"¹⁵

Organisasi baru ini menekankan keterikatannya pada mazhab Syafe'i dan memutuskan untuk berusaha sungguh-sungguh guna menjaga langsungnya kebiasaan bermazhab di Mekkah dan di Indonesia. Sebaliknya dikatakan bahwa tidak terkandung maksud apapun untuk menghalangi mereka yang tidak mengikuti mazhab Syafe'i.

Rapat bulan Januari 1926 itu memutuskan untuk mengirim dua orang utusan yaitu; K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim Almishry untuk menghadap Raja Ibnu Da'ud untuk mempersembahkan pendapat organisasi tentang masalah mazhab, serta mengadakan seruan kepada raja tersebut untuk mengambil langkah-langkah guna kepentingan mazhab serta memperbaiki keadaan perjalanan haji. Suatu audiensi dengan Raja Ibnu Sa'ud juga diminta dengan perantaraan konsulat pemerintah Belanda di Jeddah, tetapi kedua orang utusan itu tak dapat berangkat karena terlambat memesan tempat di kapal. Sebagai gantinya Nahdlatul Ulama mengawatkan isi keputusan rapat mereka kepada kepala negara Sa'udi dengan tambahan permintaan agar isi keputusan ini dapat dimasukkan ke dalam undang-undang Hijaz.

Melihat kedua tesis di atas, agaknya tidak dapat dibantah bahwa kelahiran NU merupakan bagian dari pola umum reaksi anti pembaharu yang tarik menarik dengan keadaan perkembangan dunia Islam Internasional

Disamping hal tersebut masih terdapat faktor historis lain yaitu adanya pergulatan panjang yang terjadi sebelum kelahiran NU, sejak awal abad kedua puluh, ketika sejumlah ulama muda pesantren mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan,

¹⁵ K.H. Saifuddin Zuhri, *K.H. Abdul Wahab Hasbullah, Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Yamunu, 1972), h. 26

dengan obsesi mengenai hari depan umat (*nahdlatul wathon*, *nahdhatul tujjar*, dan *taswir fikkar*).

2. Sejarah Perkembangan NU

Nahdlatul Ulama lahir dari tekad para ulama untuk memberikan jawaban kepada berbagai masalah yang muncul di kalangan umat Islam baik yang bersifat keagamaan, pendidikan dan politik. Baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.

Nama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) biasanya disingkat NU tidak hanya secara kebetulan dipilih untuk organisasi ini. Dipilihnya nama tersebut -bukan *Nahdlatul Muslimin* atau *Nahdlatul Ummah*, umpamanya- membuktikan betapa penting dan khasnya kedudukan ulama dalam organisasi itu.

a. NU sebagai Organisasi Agama

Sekurang-kurangnya ada dua hal yang membuat ulama memperoleh tempat yang demikian penting dalam NU. *Pertama*, sebagai organisasi keagamaan, NU harus memilih kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara moral, ilmu, amal dan akhlak keagamaannya. Ulama yang dalam hadis disebut-sebut sebagai “pewaris para nabi” tentulah yang paling mendekati tuntutan itu. *Kedua*, seorang ulama yang paling kecil lingkup pengaruhnya pun selalu mempunyai kewibawaan dan pengaruh atas santri dan murid-muridnya. Ulama juga memiliki jalur kewibawaan langsung dengan masyarakat sekeliling yang dapat menembus batas-batas kelompok organisasi, batas-batas kedaerahan atau lebih luas lagi.

Kewibawaan dan pengaruh ulama yang sudah membudaya itulah di dalam organisasi NU di kongkritkan secara formal organisatoris pada struktur kepemimpinan

atau kepengurusan lembaga Syuriah, mulai dari pusat sampai ke ranting-ranting. Demikian penting kedudukan dan peranan ulama di dalam NU sehingga seorang warga NU, betapa pun besar prestasi dan prestisenya di bidang lain, haruslah bersedia menempatkan diri di bawah bimbingan ulama.

Sejak berdirinya NU tahun 1926, tujuan NU secara eksplisit adalah mengembangkan ajaran-ajaran *Ahlussunnah wal jamaah* dan berlingkup dari penyimpangan-penyimpangan kaum pembaharu dan modernis. Diantara pasal kunci 2 dan 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2. Adapoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe: Memegang tegoe pada salah satoe dari mazhabnya imam empat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris asj-Sjafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboe Hanifah an-Noe'man, atau Imam Ahmad bin Hambal dan mengerjakan apa sadja jang mendjadikan kemaslahatan Agama Islam.

Pasal 3. Oentoek maksoed perkoempoelan ini maka diadakan ichtiar: Mengadakan perhoeboengan di antara oelama-oelama jang bermazhab terseboet dalam pasal 2.

Memeriksa kitab-kitab sebeloenya dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe dari kitab-kitabnja ahli bid'ah.

Menjiarkan Agama Islam di atas mazhab sebagai terseboet dalam fasal 2, dengan djalan apa sadja jang baik.

Berichtiar memperbanjarkan madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam.

Memperhatikan hal jang berhoeboengan dengan masjid², langgar², pondok², begitoe djoega dengan hal ahwalnja anak-anak jatim dan orang² jang fakir miskin.

Mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan, jang tiada dilarang oleh sjara' Agama Islam.¹⁶

Anggaran dasar NU tersebut secara eksplisit menggambarkan upaya melindungi Islam tradisional dari bahaya-bahaya gagasan dan praktek keagamaan kaum pembaharu. Pendidikan harus ditingkatkan, begitu pula halnya dengan bidang kehidupan lainnya.

Menurut Slamet Pada tahun 1938-1939 sebagai gerakan keagamaan, NU membuat kegiatan yang besar sekali artinya dalam bidang ekonomi. Gerakan itu mereka

sebut sebagai “*Moment actie Gerakan Mabadi Chaeoro oemmah*” yang mengarahkan semangat tolong menolong (*Mu’awanah*) di lapangan ekonomi bangsa Indonesia dengan meningkatkan kemampuan bangsa di bidang ini dan menanamkan pendidikan moral yang bertumpu pada tiga prinsip: *Shiddiq, amanah dan ta’awun*.¹⁷ Dimasa ini dengan menggunakan media-media yang dimiliki NU seperti *Berita Nahdlatul Oelama* yang dipimpin oleh K.H.Mahfudz Siddiq dan *Swara NO* yang dipimpin oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah, NU melakukan penyebar luasan ide-ide, menciptakan komunikasi yang luas di antara para anggota dan tokoh-tokohnya. Media yang disebut terakhir terbit dalam 3 bahasa, Indonesia, Jawa dan Arab.

Dengan demikian, agaknya keberadaan NU merupakan upaya meligitimasi kembali sebuah tradisi keagamaan dan sosial yang sebenarnya telah melembaga dalam jaringan struktur dan pola kepemimpinan yang mapan. Zamakhsari Dhofier menjelaskan bahwa: “Lembaga-lembaga pesantren, kyai, santri dan jama’ah mereka yang tersebar di tanah air sebagai unit-unit komunitas sosial budaya masyarakat Islam, menjadikan NU tidak begitu kesulitan menyebarkan organisasinya. Apalagi pengaruh K.H.Hasyim Asy’ari dan Kyai Wahab di lingkungan pesantren cukup kuat, sehingga ketika NU pertama kali diperkenalkan begitu mudah menarik minat dan simpati serta dukungan para kyai yang memimpin pesantren”.¹⁸

Dengan *back ground* seperti inilah, maka pengembangan NU sejak tahun pertama mendapat sambutan yang luas. Dalam waktu yang tidak lama, hampir seluruh pulau di Jawa sudah terbentuk cabang-cabang NU. Menurut Deliar: “Pada kongres tahun 1930 ada 6 cabang Jawa Barat, 21 cabang Jawa Tengah dan 18 cabang di Jawa timur

¹⁶ Martin, *op. cit.*, h. 42

¹⁷ Slamet, *op. cit.*, h. 34

hadir. Pada tahun itu juga di Banjar Martapura (Kalimantan) dibentuk cabang baru yang tercatat sebagai cabang pertama NU untuk luar Jawa. Tahun 1936 sebuah organisasi lokal di Kalimantan *Hidayatul Islamiyah* menyatakan bergabung dengan NU. Pada saat kongres 1937 di Malang, sudah ada 71 cabang yang hadir. Dan ketika pemerintah kolonial Belanda bertekuku lutu pada balatentara Jepang, NU sudah memiliki 120 cabang, yang tersebar di Jawa dan Kalimantan.¹⁹

Disaat kemerdekaan Indonesia di proklamirkan, pelebaran sayap NU makin luas. Sehingga dewasa ini hampir setiap propinsi-kecuali Timor timur-NU sudah mempunyai pengurus cabang.

Pada sisi lain, dalam perkembangannya NU merasa organisasinya mengalami kemajuan yang pesat. Banyak ulama-ulama muda pesantren yang memperoleh kemajuan dan memusatkan pengembangan karir mereka dalam percaturan politik, oleh karena itu dalam perjuangan NU selanjutnya, pada gilirannya terlalu banyak terlibat dalam gerakan politik sampai pada politik praktis.

b. NU sebagai Partai Politik

Dalam historisnya, NU lahir bukan karena orientasi politik, melainkan dari wawasan keagamaan. Orientasi politik mulai berkembang di kalangan NU, ketika sejumlah pemuda yang memegang pimpinan pengurus pelaksana harian (*tanfiziah*) sejak akhir dasa warsa tiga puluhan. Mahfuz Siddiq, Abdullah Ubaid, M. Ilyas dan A.Wahid Hasjim, adalah eksponen yang mempunyai kecenderungan untuk menggalang kesatuan gerakan dengan kelompok-kelompok muslim diluar NU. Kontak-kontak secara langsung antara tokoh-tokoh NU dengan berbagai kalangan tidak bisa dihindari. Apalagi kemudian

¹⁸ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3 ES, 1982), h. 96

NU harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan Belanda secara terus menerus dipakai untuk mengganggu hal-hal yang dipandang sebagai prinsip dari kehidupan bangsa dan agama. Dalam hubungan ini terlihat NU yang menentang Ordonansi Guru, Ordonansi Pencatatan Perkawinan 1937 (sejenis UU perkawinan) menolak milisi untuk menghadapi Jepang, ikut menuntut Indonesia berparlemen, penolakan terhadap artikel 177 *Indische Staatregeling* yang mengandung semangat diskriminasi golongan dan agama, dan lain-lain.

Sikap itu mendatangkan kesadaran baru, bahwa kekuasaan Belanda secara terus menerus dihadapkan kepada Islam. Untuk mengakhiri kekuasaan yang seperti ini, bagaimanapun pemerintahan Belanda harus diakhiri. Dan untuk itu bangsa Indonesia harus merdeka. Sejak saat itu secara luas, intensitas keterlibatan NU pada perjuangan politik makin kelihatan. Menurut Deliar bahwa: “Dalam tahun 1935 K.H.Hasjim pada kesempatan kongres NU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengeluarkan sebuah sirkuler yang menyeru semua ulama peserta kongres untuk mngesampingkan semua pertikaian, membuang perasaan *ta’asub* (fanatik) dalam berpendapat melupakan segala cacian dan celaan terhadap sesama serta menegakkan persatuan...”.²⁰

Kebijaksanaan Belanda yang merusak Syariat Islam dan kesadaran ummat akan persatuan membawa hikmah tersendiri, ketika NU dan Muhammadiyah bersama-sama membentuk *Majlisul Islam A’la Indonesia* (Majlis Tertinggi Islam Indonesia), yang disingkat MIAI pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya.

¹⁹ Deliar Noer, *loc. cit.*

²⁰ *Ibid.*, h. 261

Harry J. Benda, melukiskan kejadian ini sebagai bukti bahwa: perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan luar akhirnya menyempitkann jurang perbedaan antara kaum reformis dan ortodoks.²¹

Umumnya pembentukan MIAI ini disambut baik oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Jumlah anggotanya pun bertambah dari tujuh pada tahun 1937 menjadi dua puluh satu pada tahun 1941. Meskipun demikian persatuan bukanlah masalah yang muda bagi MIAI. Hal ini muncul pada dua kejadian, pertama tentang Nahdlatul Ulama, dan ini dapat diatasi, kedua tentang Ahmadiyah Lahore yang tetap berada di luar federasi.

Arena perjuangan politik NU makin melebar ketika Jepang menguasai Indonesia. NU termasuk organisasi yang dilarang oleh Jepang, tetapi NU tidak mungkin dibendung. Sarana komunikasi yang sangat beragam yang dimiliki NU berupa pranata dan institusi sosial tidak mungkin menghentikan organisasi NU secara material. Menurut Slamet: “ Ketika Jepang mewajibkan agar bangsa Indonesia pendewaan terhadap Kaisar Jepang Tenno Haika dengan cara membungkukkan badan ke arah timur pada waktu-waktu tertentu, NU langsung menyatakan penolakannya. Seperti juga semua orang Islam, pendewaan kepada selain Allah, dipandang sebagai perbuatan *syirk* oleh NU. K.H. Hasjim Asj’ari secara terbuka menyatakan penolakan itu. Dan Jepang mencoba menghambat penolakan ini dengan menjebloskan Hadrotusyaikh K.H. Hasjim Asj’ari ke dalam tahanan. Orang-orang Islam mulai mengetahui, bahwa Jepang tidak memenuhi

²¹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), h. 119

janjinya yang akan menghormati agama Islam. *Saikeirei* yang mereka wajibkan kepada bangsa Indonesia secara luas merupakan api yang membakar perlawanan umat Islam”.²²

Melihat kenyataan ini, K.H. Zaenal Mustafa dari Singaperbangsa (seorang NU) kemudian mengangkat senjata, suatu perlawanan bersenjata yang pertama kali dilakukan terhadap Jepang. Perlawanan itu berhasil dipadamkan, tetapi bukan berarti tidak membawa hasil. Kebijakan Jepang kepada Islam mulai berubah. Bulan itu juga dua organisasi Islam NU dan Muhammadiyah dicairkan pembekeuannya.

Ketika MIAI mencapai akhir pengabdianya dengan dibentuknya federasi baru *Majelis Syuro Muslimin Indonesia*, yang disingkat Masjumi, K.H. Hasjim Asj'ari diangkat menjadi pimpinan tertinggi. Meskipun demikian, hal ini tidak serta merta merubah perlawanan NU terhadap Jepang.

Sesudah tanggal 7 Nopember 1945 Masjumi dinyatakan menjadi partai politik dan ketuanya tetap K.H. Hasjim Asj'ari, serta menjadi salah seorang ketuanya yaitu K.H. Wahid Hasjim, kedua-keduanya berasal dari NU. Dengan demikian masuknya NU ke dalam gelanggang politik semakin dalam. Kemudian dibentuknya organisasi latihan kemiliteran *Hizbullah* dan *Sabilillah* serta masuknya K.H. Hasjim Asj'ari dan K.H. Masjkur de dalam badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia memperluas jaringan keterlibatan tokoh-tokoh NU ke dalam semua perkembangan politik di Indonesia.

Agaknya menjadi jelas, masuknya NU ke gelanggang politik pada tahun 1930an, hingga masa-masa awal Republik Indonesia, memang didasari oleh watak NU yang selalu bertumpu pada wawasan keagamaan yang kokoh dan keterikatan terhadap

²² Slamet, *op. cit.*, h. 37

nasib tanah airnya yang kuat, sehingga aksi-aksi politiknya mencerminkan corak nasional yang dilandasi oleh amanat keagamaan.

Pada periode ini, keterlibatan NU di bidang politik identik dengan tujuan semua pergerakan nasional, sehingga kegiatannya selalu ada pada dataran yang berlingkup kepentingan Indonesia dan umat Islam.

Selanjutnya pemilu tahun 1955 merupakan saat yang penting bagi NU untuk membuktikan dirinya sebagai partai politik yang mempunyai basis masa yang kuat. Menurut Laode Ida: “Perolehan suara 18,4 % dari total pemilih (45 kursi di parlemen), menjadi kekuatan tiga besar dari *the big four*: PNI, Masjumi NU dan PKI. Perolehan suara ini sangat berarti dengan suatu peningkatan 500% dibanding dengan kursi NU melalui Masjumi yang hanya 8 kursi”.²³

Peningkatan yang spektakuler ini, menurut Mahrus Irsyam, sebetulnya lebih karena perubahan strategi kampanye dimana NU mencoba mengambil jalan tengah yang menguntungkan bagi partai itu, di tengah kecenderungan politik pada saat itu. Kecuali PNI, partainya pemerintah saat itu, dimana NU bersikap akomodatif, terhadap dua partai politik lainnya yang dikuatiri oleh NU, Masyumi dan PKI. NU mencoba melihat sisi kelabu kedua partai saingannya. Dengan mengutip Herbert Feith, Irsyam mengatakan: “Memilih Masyumi berarti mendatangkan ancaman, memilih PKI pun mendatangkan bahaya; oleh karena itu pilihan yang tepat adalah PNI atau NU.”²⁴

Dipojokkannya Masyumi sebagai ancaman, nampaknya berkaitan erat dengan dugaan bahwa beberapa tokoh Masyumi turut mendukung gerakan DI/TII yang terlibat langsung dalam berbagai pemberontakan pada saat itu, sementara terhadap PKI memang

²³ Laode Ida, *op. cit.*, h. 24

²⁴ Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), h.36

secara ideologis partai itu ditolak NU, apalagi sudah terbukti melakukan pemberontakan di Madiun.

Keberadaan NU sebagai partai tentu saja harus berfikir agar tetap *survive*, yakni terhadap pemerintah yang berkuasa (PNI) untuk bisa selalu bekerja sama. Sebaliknya terhadap partai-partai saingannya, NU mewaspadainya. Dengan demikian berpengaruh kuat terhadap strategi yang diterapkannya, di mana bersifat *fully co-operative* terhadap pemerintah dan *limited co-operative* terhadap Masyumi dan PKI.

Dalam pergantian pemegang pucuk kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, NU tidak serta merta percaya terhadap Soeharto. Pemerintah Orde Baru pun, pada awalnya, tampak tidak terlalu peduli dengan posisi NU, walaupun tetap diakui bahwa NU merupakan kekuatan besar kedua setelah GOLKAR. Ketidakterlalu diakomodirnya NU, walaupun lebih karena sumberdaya tokoh-tokohnya yang tidak terlalu sesuai dengan gagasan-gagasan pembangunan Orde Baru yang menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi, yang konsekwensinya adalah diperlukannya tenaga-tenaga intelektual yang berilmu dan berwawasan pembangunan ekonomi, sementara NU sangat kurang dengan sumberdaya seperti yang diharapkan. Di sinilah faktor utama yang memperlemah tawar menawar NU pada awal Orde Baru, yang terus mempengaruhi perjalanan organisasi ini selanjutnya.

Percaturan politik Islam di masa Orde Baru ditandai pula dengan bangkitnya kekuatan lama Masyumi dalam bentuk baru, yakni Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) . Lahirnya lembaga politik baru ini berangkat dari obsesi tokoh-tokoh Masyumi untuk berkiprah kembali ke dunia politik pada situasi politik berbeda di masa Orde Baru, yang semula bertujuan untuk merehabilitir nama Masyumi. Namun hal itu sulit untuk

diwujudkan. Sehingga menetapkan pilihan lain yakni mendirikan partai Islam yang walaupun dengan nama lain tetapi mempunyai tujuan yang sama dengan Masyumi. Strategi ini disahuti oleh pemerintah, sehingga berdirilah Parmusi tahun 1968.

Tetapi tampaknya “Masyumi” baru ini tak seperti yang diduga seperti halnya juga menjadi obsesi dari tokoh-tokohnya, karena perolehan suara jauh dibawah NU. Menurut Laode NU mendapat 10.213.650 suara sedangkan Parmusi; 2.930.740 suara. Ini artinya, pada saat itu, secara massa NU masih tetap unggul dibandingkan dengan partai-partai Islam lainnya. Pemerintah Orde Baru mengabaikan partai politik sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan di kabinet. Berakhirnya kepemimpinan Orde Lama, berakhir pula masa jaya partai-partai politik untuk memperebutkan posisi di kabinet. Sebab era pemerintahan Golkar, tampaknya, merupakan pemerintahan golongan. Orsospol mana yang menjadi pemenang dalam Pemilu, merekalah yang menentukan personal kabinet dari unsurnya sendiri.

c. NU dalam Era Depolitisasi

Era depolitisasi dimaksudkan sebagai era dimana dilakukannya penyederhanaan partai-partai politik, dibarengi tindakan pemerintah yang tidak memfungsikan partai-partai politik yang ada secara terus menerus. Pada kurun ini menunjukkan periode keterasingan partai politik atas peran politik yang seharusnya dimainkan, karena intervensi pemerintah dengan menggunakan militer dan birokrasi sebagai instrumen depolitisasi itu.

Gagasan fusi partai yang dilakukan pada tahun 1973 secara formal dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan sistem perpolitikan di Indonesia, dengan tetap mempertahankan aliran-aliran yang hidup dalam masyarakat.

Inti dari pemikiran ke arah fusi partai tampaknya lebih berorientasi dalam rangka mendukung strategi pembangunan Orde Baru yang menekankan aspek pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh stabilitas yang mantap (*security approach*). Fusi partai, kemudian, teridentifikasi menjadi tiga kelompok. Menurut Santoso: ketiga partai tersebut adalah: *Pertama*, golongan nasionalis, yang terdiri dari PNI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik; *Kedua*, golongan spiritual yang terdiri dari partai-partai Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti); dan *Ketiga*, Golongan Karya.²⁵

Selain itu penyederhanaan partai juga dapat dilihat sebagai strategi untuk tidak menghidupkan kembali ideologi-ideologi yang ada dalam masyarakat yang berwujud pada pengelompokan partai politik. Ini merupakan kelanjutan dari upaya menghancurkan sisa-sisa pemikiran mantan pemikiran Soekarno yang sangat gigih mempertahankan ideologi-ideologi yang hidup dalam masyarakat, termasuk di dalamnya ideologi Marxisme.

C. NU dan modernisme

Tradisi keilmu-agamaan yang dianut NU bertumpu pada *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*. Menurut Abdurrahman Wahid, doktrin tersebut berpangkal pada tiga buah panutan inti; mengikuti faham Asy'ari dan Maturidi dalam bertauhid; mengikuti salah satu mazhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali); dan mengikuti cara yang ditetapkan oleh Junaidi al-Baghdadi, Al-Ghazali dalam bertarikat atau bertasawuf.²⁶

²⁵ Priyo B Santoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 101

²⁶ Abdurrahman Wahid, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fiqh dalam Politik*, dalam Taufik Abdullah & Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 197-198

Inti tradisi keilmuan yang dianut NU merupakan perpautan antara tauhid, fiqh dan tasawuf yang begitu komprehensif dan saling melengkapi, yang dalam jangka panjang akan menumbuhkan paradigma terpautnya antara dimensi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Hal tersebut merupakan mekanisme kejiwaan yang berkembang di lingkungan NU dalam menghadapi arus sekulerisme yang timbul dari proses modernisasi. Dari tradisi keilmu-agamaan seperti itu merupakan hal yang tidak mustahil jika pada gilirannya akan melahirkan pandangan yang agak moderat.

Ada beberapa kaedah yang menarik untuk dicermati yang biasa menjadi pegangan NU. Abdurrahman Wahid menyebutkan kaedah-kaedah tersebut antara lain: Apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya, elemen yang sudah dicapai tidak ditinggalkan; Menghindarkan bahaya, didahulukan atau diutamakan daripada melaksanakan kewajiban yang baik; Jika terjadi benturan dua hal yang sama buruk, dipertimbangkan yang lebih besar bahayanya dan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya; Jika suatu kewajiban tidak bisa dicapai dengan sempurna kecuali dengan syarat tertentu, maka syarat itupun wajib; Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik; Hidup dunia sangat penting, kalau dijadikan persiapan untuk kebahagiaan akhirat, dan akan kehilangan artinya jika tidak diperlakukan seperti itu.²⁷

Melalui pendekatan keilmu-agamaan dan kaedah-kaedah seperti ini, menjadikan NU mampu menyikapi (secara moderat) terhadap beberapa persoalan yang muncul kepermukaan. Dalam konteks ini terlihat sekali beberapa kasus antara lain seperti: diterimanya Presiden RI pertama sebagai pemegang pemerintahan-*waliyul amri dharury bissyaukah*- yang masih ditolerir dalam pemahaman fiqh. Menurut Gus Dur; Pendekatan serba fiqh atas masalah-masalah kenegaraan itulah yang membuat NU relatif lebih mudah

menerima ketentuan pemerintah tentang asas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Dengan meletakkan kunci masalah pada pengesahan hukum fiqh, NU mampu melakukan suatu proses penyesuaian dengan tuntutan sebuah negara moderen.

Persoalan-persoalan demikian biasanya dibicarakan oleh kalangan NU dalam lembaga *bahsul masa'il*. Menurut Martin: Lembaga ini membicarakan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama. Kondisi ini yang menjadi keluhan bagi kalangan muda pesantren, sebab berbagai masalah sosial, ekonomi, politik dan moral yang mendesak cenderung terabaikan.²⁸ Oleh sebab itu muncul sebagian ulama muda NU, terus melakukan berbagai upaya untuk memperluas cakupan fatwa dan meningkatkan kualitas penalaran yang mereka jadikan dasar perumusan. Salah seorang diantaranya adalah Kyai Mustafa Bisri, ia berupaya memperkenalkan perubahan-perubahan dalam pola-pola sidang *bahsul masa'il* tradisional. Ia menginginkan berbagai persoalan yang ada dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan jika memungkinkan dapat meminta penjelasan dari para ahli dalam bidang lain, seperti ekonomi, kedokteran, teknik dan lain-lain, sebelum para ahli fiqh menyampaikan fatwanya.

Selanjutnya masalah-maslah yang akan dibicarakan harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadi perenungan serius dan akan lebih menggairahkan jika pembicaraan tidak hanya menyangkut satu masalah saja, tetapi sejumlah masalah yang berbeda-beda, namun berkaitan satu sama lain.

Dengan pola yang demikian, NU (dalam beberapa pertemuannya) ikut terlibat membicarakan beberapa persoalan yang antara lain tentang operasi penggantian jenis kelamin, sebuah isu pokok yang mencuat di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam

²⁷ *Ibid.*, 199

²⁸ Martin, *op. cit.*, h. 213

membahas persoalan ini, NU tidak hanya mengundang seorang ahli bedah tetapi juga seorang yang pernah menjalani operasi ganti kelamin yang bersedia mengungkapkan pengalamannya. Setelah dibahas bersama-sama dalam sidang *bahsul masa'il*, akhirnya fatwa NU mengambil keputusan bahwa operasi penggantian jenis kelamin dilarang.

Muktamar NU tahun 1989 membicarakan beberapa agenda masalah yang dibagi kedalam empat kelompok; masalah ibadah (yang menjadi fokus pembicaraan pada waktu itu adalah persoalan haji); keluarga; kesehatan dan masalah ekonomi. Menurut Martin, dua masalah kesehatan yang diangkat cukup aktual, yaitu tentang wasiat mewariskan salah satu organ tubuh untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkan dan membahas masalah yang berkaitan dengan *euthanasia*.²⁹ Hasil mu'tamar menyimpulkan bahwa: wasiat mewariskan salah satu organ tubuh boleh saja dilakukan jika tidak ada alternatif lain. Sedangkan mengenai euthanasia dilarang (tidak boleh dilakukan).

Dalam persoalan ekonomi, tahun 1950-an para pemimpin NU mendirikan Bank Nusantara di Jakarta dan Bank Haji di Semarang. Wk. Ro'is Am, K.H.Ali Yafie, merujuk pada sebuah muktamar NU di Banten (1938) yang mengesahkan bank. Selain itu terdapat usaha penting dalam rangka mengimplementasikan program untuk mendorong peningkatan ekonomi yaitu pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR NU) yang merupakan kerja sama warga NU dengan Bank Summa. BPR NU menyediakan kredit kecil kepada para wiraswastawan kecil dan petani yang berlatar belakang NU. Dalam prakteknya, PB NU merujuk pada sebuah keputusan dalam muktamar, yang

²⁹ *Ibid.*, h. 217-219

membolehkan bunga bank (milik pemerintah) dan juga usaha-usaha NU sebelumnya untuk mendirikan bank.

Belakangan ini kiprah aktifis muda NU semakin gencar untuk bersikap inovatif dalam berbagai persoalan-persoalan kesemestaan. Yang demikian dapat dilihat dengan munculnya *halaqah* sebuah gerakan yang dipelopori oleh tokoh muda Masdar Farid Mas'udi dan kawan-kawan. Masdar adalah seorang aktifis PMII yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu tradisional, tetapi menguasai ilmu-ilmu lainnya dan punya wawasan yang luas.

Diskusi-diskusi di lingkungan mereka akhir-akhir ini menjurus ke pokok persoalan keterbelakangan di Dunia ketiga, keadilan ekonomi dan hak-hak asasi, termasuk hak-hak perempuan dalam Islam.

Selain itu, di kalangan pemikir muda NU berupaya mengembangkan wacana Islam baru, yang didasarkan atas fiqh tradisional, tetapi mampu menjuruskannya kepada keprihatinan-keprihatinan sosial, ekonomi, politik kontemporer, fiqh kerakyatan atau teologi pembangunan, demikian istilah yang sering mereka isukan. Mereka membuka diri terhadap pengaruh berbagai corak intelektual, muslim maupun non muslim, tetapi pada saat yang sama tetap mengakar dalam tradisi dan tidak mengesampingkan identitas *Ahlussunnah Wal Jamaah* mereka.

Pembicaraan di lingkungan tokoh-tokoh muda NU ini akan memberikan kontribusi dan tekanan kepada para ulama Syuriah NU, untuk menyoroiti masalah-masalah yang sama dan memikirkan kembali banyak pandangan fiqh yang dianggap sudah mapan.

Di bidang politik, belakangan ini, NU ternyata mempunyai pemikiran yang eksklusif (jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya) tentang presiden wanita. Dalam hal ini NU tidak mempersoalkan jenis kelamin pria atau wanita, wanitapun mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dengan pria. Menurut NU tidak ada dalil Hukum yang melarang wanita untuk menjadi pemimpin dalam suatu negara. Dalil yang berbunyi: “laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”, berlaku dalam sebuah rumah tangga, tetapi tidak berlaku bagi negara.

D. Penutup

Sebagai organisasi sosial keagamaan tradisional dan merupakan fenomena rural, NU memiliki vitalitas yang tinggi. Suatu kekuatan sosial, kultural dan keagamaan yang mempunyai vitalitas tidak mungkin beku tanpa mengalami perubahan.

E. Daftar Bacaan

Abdurrahman Wahid, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fiqh dalam Politik*, dalam Taufik Abdullah & Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1988

Alfian, *Sekitar lahirnya NU, Resume Tesis tahun 1969 h. 2: Dokumentasi Lakpesdam*, tidak dipublikasikan.

Deliar Noer, *Gerakan moderen Islam di Indenesia*, Jakarta: LP3ES, 1980

Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980

K.H. Saifuddin Zuhri, K.H. Abdul Wahab Hasbullah, *Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Yamunu, 1972

Laode Ida, *Anatomi Konflik: NU, Elit Islam dan negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

M. Ali Haidar, *NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1995

Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984

Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994

Priyo B Santoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Slamet Effendi Yusuf (et. al), *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, (Jakarta: CV. Raja Wali, 1983

Snouck Hurgronje, dikutip dari Clifford Geertz, *Modernization in a Moslem Society: The Indonesian Case*, dalam *Quest*, vol. 39, Bombay, 1963

Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3 ES, 1982